

Peran Aktor Dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

Syafrinaldi¹, lip Permana²

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: Syafinaldinaldi765@gmail.com, ipaddr@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aktor yang terlibat dalam pengelolaan program simpan pinjam perempuan (SPP) yang dijalankan oleh BUMNagMa guna memberdayakan masyarakat terutama perempuan untuk meningkatkan perekonomian melalui kegiatan usaha produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode utama untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini : (1) Dalam implementasi program SPP di BUMNagMa aktor memiliki 6 indikator peran, berupa (a) wewenang aktor dalam melaksanakan program SPP, (b) kemampuan yang dimiliki target program dalam memanfaatkan dana program SPP, (c) keyakinan aktor dalam mencapai tujuan program SPP, (d) kesempatan yang diberikan aktor kepada target program, (e) tanggungjawab yang diberikan aktor dan target program jika terjadi persoalan dalam implementasi program, (f) dukungan yang diberikan oleh aktor untuk menunjang pemanfaat dalam menggunakan dana program SPP. (2) Upaya dalam menyelesaikan persoalan kredit macet, berupa (a) melakukan evaluasi, identifikasi, komunikasi dan negosiasi (b) lakukan tinjauan bersama dengan surat peringatan, (c) Jika permasalahan kredit macet lewat dari 2 tahun, kelompok yang bersangkutan mendapat catatan merah (d) jika sudah tidak bisa diselesaikan, atas kesepakatan kelompok, maka kredit macet akan ditutupi dengan tanggungan renteng.

Kata kunci: *Peran, Aktor dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)*

Abstract

This research aims to see how the role of actors involved in the management of the women's savings and loan program (SPP) run by BUMNagMa to empower the community, especially women, to improve the economy through productive business activities. This research uses a qualitative approach with a descriptive design. This research used purposive sampling technique. The main method for collecting data is through interviews and documentation. The research was conducted at BUMNagMa VII

Koto Sungai Sariak in Padang Pariaman Regency. The results of this study: (1) In implementing the SPP program in BUMNagMa, actors have 6 role indicators, in the form of (a) actor authority in implementing the SPP program, (b) the ability of program targets to utilize SPP program funds, (c) actor confidence in achieving SPP program goals, (d) opportunities provided by actors to program targets, (e) responsibilities given by actors and program targets if problems occur in program implementation, (f) support provided by actors to support users in using SPP program funds. (2) Efforts in resolving bad credit problems, in the form of (a) conducting evaluations, identification, communication and negotiations (b) conducting joint reviews with warning letters, (c) If the bad credit problem passes more than 2 years, the group concerned gets a red record (d) if it cannot be resolved, by group agreement, the bad credit will be covered by joint responsibility.

Keywords: *Role, Actors And Women's Savings And Loan (SPP)*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional memiliki tujuan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat mengatur kehidupan yang layak, salah satu penyebab dari rendahnya perekonomian adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan perlu diperhatikan di Indonesia. Pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan, adil dan makmur, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan jika kemiskinan bisa dikurangi melalui upaya penanggulangannya. (Astuti Pb, 2004)

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat yang berarti masyarakat berdaya lemah yang diberikan kekuatan melalui suatu program pemberdayaan sehingga masyarakat itu menjadi kuat, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan prinsip yang mendasari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (Haerana 2023)

Dalam konteks ilmu Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang upaya pengembangan kemandirian masyarakat melalui kebijakan atau program yang sesuai dengan esensi masalah di masyarakat.

Untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh secara efisien, diperlukan usaha yang tekun, langkah-langkah proaktif, kemandirian, dan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah. (Sumaryadi, 2005) Masyarakat dan pemerintah dapat membangun inisiatif pembangunan partisipatif untuk secara efektif menerapkan strategi pembangunan yang selaras dengan otonomi daerah dan berpusat pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Berbagai program telah dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat salah satu program pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak adalah program Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMa) yang merupakan transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri atau UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. UPK PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan yang dibangun pada tahun 2007 atau pada masa pemerintahan Presiden SBY, bentuk dari program ini berupa pembangunan irigasi, perbaikan jalan antar desa serta program non fisik seperti Kelompok simpan pinjam bagi perempuan (SPP) sebagai bentuk bantuan pinjaman dana usaha bagi masyarakat yang mana dana pelaksanaan program ini bersumber dari dana Hibah *World Bank*. Simpan pinjam perempuan melibatkan pengumpulan dan penyaluran dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan ini dilakukan oleh dan untuk anggota koperasi, serta calon anggota koperasi dan anggota dari koperasi lain. (Sumani, S., Siregar. 2021)

Dana dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini hanya diberikan pemerintah pusat kepada UPK (PNPM) Mandiri Perdesaan hingga tahun 2013 atau hingga sebelum masa jabatan Presiden SBY usai, setelah itu UPK PNPM Mandiri beroperasi dan melanjutkan program pemberdayaan masyarakat tanpa dana dari pemerintah pusat dan hanya mengelola semua dana yang ada.

Sebelum perubahan UPK PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak, program yang di implementasikan oleh pengelola UPK terbilang baik dan terlaksana sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan irigasi di beberapa desa di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak seperti irigasi di Korong Sungai Tareh Nagari Balah Aie Utara, pembangunan beberapa jembatan akses antar desa seperti jembatan baleri di Korong Sikareh Nagari Lurah Ampalu juga menjadi bukti baik nya pengelolaan yang dilakukan UPK PNPM Mandiri Perdesaan VII Koto.

Pada bulan Oktober 2023, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak mengalami perubahan nama dan sekarang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMA) VII Koto Sungai Sariak. Informasi yang diberikan berasal dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021, tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan Bumdes di tingkat nagari. Kemendes-PDT RI Nomor 15 Tahun 2021 menguraikan proses penunjukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat (DBM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa).

Berdasarkan pasal 1 Kemendes-PDT RI Nomor 15 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa dan warganya untuk mengawasi kegiatan usaha demi kepentingan masyarakat desa secara optimal. Di wilayah Sumatera Barat, desa disebut sebagai Nagari. Pemerintah telah membentuk Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMa) sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa.

Program pemberdayaan yang dijalankan oleh BUMNagMa berupa lanjutan dari program UPK PNPM Mandiri Pedesaan yaitu pengelolaan dana bergulir masyarakat (DBM) hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PDT-RI No. 15 Tahun 2021, yang menetapkan dana yang didedikasikan secara khusus untuk tujuan peningkatan modal usaha bagi kelompok masyarakat. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.05/2009.

Program yang dilaksanakan oleh BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sariak adalah pinjaman dana bergulir yang menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, atau penawaran jasa keuangan lainnya. Penerima utama dari program ini sebagian besar adalah perempuan dari keluarga prasejahtera yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk melakukan kegiatan produktif atau kegiatan wirausaha untuk menghasilkan lebih banyak nilai dan pendapatan.

Program yang dijalankan oleh BUMNagMa saat ini hanya program simpan pinjam perempuan (SPP) saja, hal ini dikarenakan pemerintah pusat yang dulu rutin memberikan dana kepada UPK PNPM MP tidak lagi mengucurkan dana untuk program lain, sehingga BUMNagMa hanya melanjutkan dan melestarikan aset SPP UPK PNPM MP sebelumnya.

Kendati demikian dalam implementasi program yang dilakukan BUMNagMa bersama pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program simpan pinjam bergulir sebagai bentuk bantuan modal usaha pada kenyataannya masih terdapat masalah yang perlu diperhatikan dalam kegiatan dari unit simpan pinjam ini. BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak menjalankan program dana bergulir masyarakat (DBM) berbentuk simpan pinjam perempuan (SPP) yang merupakan lanjutan dari program Eks UPK PNPM Mandiri yang bertujuan memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada kelompok wanita di seluruh Nagari se Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Implementasi program simpan pinjam perempuan (SPP) tidak selalu berjalan baik, banyak peminfaat program yang kurang bijak dalam melakukan peminjaman sehingga usaha yang dibangun oleh peminfaat program mengalami kegagalan, peminjaman yang dikeluarkan oleh unit mengalami kredit macet karena kelalaian dari peminjam. Disamping itu penggunaan dana peminjaman yang diperutukan untuk hal konsumtif bukan produktif juga menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. hal ini terjadi akibat peran aktor yang belum terlaksana dengan baik dan adanya peran yang masih perlu dicukupi untuk pelaksanaan program SPP. Disamping itu untuk program SPP ditemukan persoalan kredit macet atau sekitar Rp 295. 537.500,- per November 2023 dari total keseluruhan kelompok SPP yang terlibat. Hal ini berarti bahwa UPK PNPM Mandiri Pedesaan VII Koto bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan program simpan pinjam perempuan (SPP) terdapat empat aktor yang memiliki peran ataupun tanggung jawab sesuai dengan posisi atau jabatan mereka. Camat Kecamatan VII Koto Sungai Sariak sebagai Pembina yang membina BUMNagMa dalam proses pelaksanaan program SPP, peran yang belum terlaksana adalah memberikan pengarahan kepada BUMNagMa dan pelatihan kepada penerima program spp untuk mengembangkan usaha yang mereka bangun.

Walinagari se-Kecamatan VII Koto Sungai Sariak berperan sebagai pihak yang menerima proposal pengajuan dana dari kelompok yang melakukan pinjaman dana, walinagari juga berperan sebagai orang yang memastikan bahwa kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut layak menerima bantuan pinjaman dana untuk modal usaha mereka, namun peran yang belum terlaksana kurangnya pengawasan dan kurang tepat dalam menyetujui proposal penerima program sehingga terjadinya penyalahgunaan dana oleh penerima program tersebut untuk kebutuhan mereka bukan untuk modal usaha

BUMNagMa berperan sebagai wadah yang menyalurkan dana dan memastikan bahwa kelompok yang mengajukan pinjaman adalah sasaran yang tepat untuk meminjam dana sebagai modal usaha mereka, disamping itu BUMNagMa juga mengawasi perkembangan usaha yang dibangun oleh perempuan penerima program SPP, namun pengawasan yang dilakukan BUMNagMa masih kurang kepada penerima program, hal ini dibuktikan dengan penerima program yang tidak menggunakan dana untuk modal usaha namun untuk kebutuhan pribadi. BUMNagMa juga perlu memberikan pelatihan pengembangan usaha kepada wanita penerima program agar mereka dapat edukasi mengenai cara mengembangkan usaha mereka.

Wanita penerima program berperan sebagai sasaran dari program SPP yang mana program ini adalah bentuk program berupa modal usaha yang dapat membantu perempuan dalam membangun usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga, namun perempuan penerima program justru menyalahgunakan dana yang seharusnya untuk modal usaha menjadi pemenuh kebutuhan pribadi mereka.

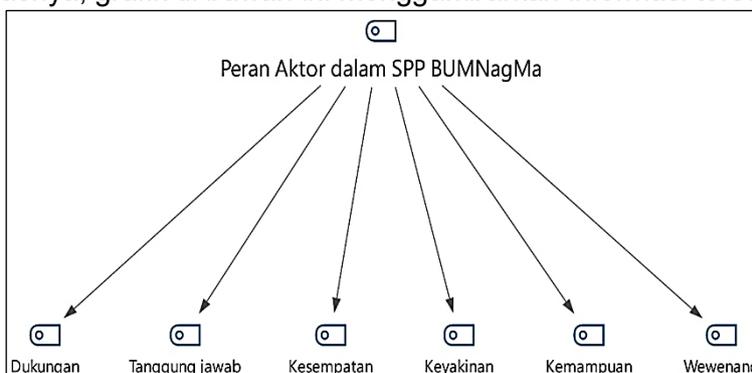
METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan, mengartikulasikan, dan menganalisis secara akurat suatu keadaan atau peristiwa tanpa adanya perubahan atau bias. Kirk dan Milter (dalam Moleong, 2006: 3). Untuk memilih partisipan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Studi penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sugiyono (2014: 224) menegaskan bahwa prosedur pengumpulan data merupakan aspek yang krusial dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Metode yang digunakan untuk menilai keakuratan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong dan Lexy (2012:230) triangulasi adalah pendekatan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 91-92), yang melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran aktor dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran aktor dalam program simpan pinjam perempuan (SPP) sehingga terjadi kredit macet. Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011), peran aktor memandang masyarakat sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan dengan membebaskan mereka dari pengawasan yang ketat dan memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka sendiri. Teori ini mengidentifikasi enam indikator yang menentukan peran aktor dalam pelaksanaan program (SPP) di BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak. Indikator pertama adalah pendelegasian wewenang berdasarkan kepercayaan. Indikator kedua adalah kombinasi antara kepercayaan dan kemampuan. Indikator ketiga adalah kepercayaan terhadap kemampuan aktor. Indikator keempat adalah pemberian kesempatan. Indikator kelima adalah pemberian tanggung jawab. Indikator keenam adalah pemberian dukungan. Untuk lebih jelasnya, grafik di bawah ini menggambarkan informasi tersebut.



Gambar 1. MAXQDA PeranAktor Dalam SPP BUMNagMa

a. Wewenang

Pelaksanaan program simpan pinjam perempuan (SPP), sebagai lembaga yang dibina oleh pemerintah daerah dan diawasi dinas DPMD, BUMNagMa diberikan wewenang dalam mengelola dan menjalankan program dengan baik guna memastikan tujuan program dapat tercapai dan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Adapun tujuan dari wewenang yang dimiliki BUMNagMa dalam rangka implementasi program SPP untuk mempermudah mencapai tujuan program. Jika mengacu pada Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011) wewenang mendefinisikan otoritas sebagai tindakan memberikan organisasi atau komunitas kemampuan untuk memodifikasi keyakinan atau pendekatan mereka terhadap pekerjaan sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Hal ini menanamkan rasa bahwa perubahan yang terjadi merupakan konsekuensi langsung dari aspirasi mereka sendiri untuk maju.

Dapat dipahami bahwa wewenang yang dimiliki pengelola BUMNagMa merupakan wewenang penuh yang diberikan DPMD untuk melakukan pelaksanaan dan pengelolaan program SPP dengan pertanggungjawaban di setiap akhir periode.

b. Percaya diri dan kemampuan

Kemampuan perempuan penerima program dibutuhkan untuk mengembangkan usaha yang mereka bangun melalui dana SPP. Hal ini sejalan dengan tujuan program SPP oleh BUMNagMa, namun faktanya ditemukan kurangnya kemampuan perempuan dan minimnya edukasi mereka dalam memanfaatkan dana SPP ini dengan baik dan produktif. Selain dibutuhkan edukasi, kemauan dan niat yang benar dari penerima program juga menjadi faktor utama dalam tercapainya tujuan dari program SPP ini. Perempuan pemanfaat program SPP kurang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang dibangun.

Pengelola BUMNagMa perlu melengkapi perannya dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada perempuan penerima program untuk pengembangan usaha mereka. Dibutuhkan edukasi dan pembinaan dalam pengembangan usaha anggota sehingga tidak terjadi lagi kegagalan usaha dan penyalahgunaan dana program SPP. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (Maani, 2011), menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kepercayaan diri dan kemampuan lebih mungkin untuk menghasilkan rasa percaya diri dengan mengenali kapasitas mereka untuk membawa perubahan dalam lingkungan tertentu.

Dapat dipahami bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pemanfaat program masih minim dalam inovasi mengembangkan usaha yang dibangun serta dibutuhkan peran aktor dalam memberikan edukasi dan pembinaan untuk berinovasi mengembangkan usahanya.

c. Keyakinan

Keyakinan dalam menjalankan program akan mencerminkan tingkat dukungan dan keterlibatan dalam proses implementasi program, keyakinan yang dimiliki oleh pemanfaat program SPP mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa untuk merubahnya. Dimana hasil akhir dari investigasi ini adalah BUMNagMa yakin bahwa program SPP dapat memberikan pengaruh dan perubahan dalam peningkatan perekonomian masyarakat khususnya perempuan dalam bentuk pengembangan usaha produktif. Keyakinan penerima program dalam mengembangkan usaha ditentukan oleh pemanfaat tersebut, jika pemanfaat dapat mengikuti SOP dan melihat kesempatan dalam pengembangan usaha, maka hal ini akan sejalan dengan BUMNagMa dan mampu mencapai tujuan program SPP. Jika mengacu pada teori Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011) yakin yaitu mengacu pada penanaman keyakinan bahwa mereka memiliki potensi untuk membuat perubahan dan harus mampu melakukannya

Dapat dipahami bahwa keyakinan dalam mencapai tujuan dari program dapat tercapai jika pemanfaat program memiliki potensi untuk membuat perubahan dan mengikuti SOP serta melihat kesempatan yang tersedia.

d. Kesempatan

Program SPP salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang berkaitan dengan akses permodalan, memberikan kesempatan dalam

bentuk modal usaha. Faktor utama yang berkontribusi terhadap ketergantungan dan keterbelakangan biasanya adalah basis keuangan yang kecil, keahlian teknologi yang terbatas, prospek lapangan kerja yang terbatas, investasi yang tidak mencukupi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan kurangnya akses ke pasar. Namun tidak jarang justru kesempatan yang diberikan disalahgunakan dan pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011), kesempatan mengacu pada pemberian kebebasan kepada individu untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginannya, sehingga mereka dapat bertumbuh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sumber daya yang tersedia di sekitarnya.

Lebih jelas penelitian yang dilakukan Dalilla Istifadah (2020) yang berjudul “Peran badan usaha milik desa bersama (BUMDesMa) terhadap peningkatan masyarakat ekonomi mikro dalam implementasi program SPP” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDesMa adalah menginspirasi perempuan untuk membuka potensi mereka dan menawarkan dukungan melalui program pelatihan.

Dalam investigasi yang dilakukan dapat dipahami bahwa dipahami bahwa BUMNagMa berperan sebagai wadah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya perempuan di Kecamatan VII Koto untuk perbaikan ekonomi berupa modal usaha, namun ditemukan kesempatan ini justru disalahgunakan.

e. Tanggung jawab

BUMNagMa akan bertanggung jawab atas siklus pengelolaan program kepada pengawas, pembina dan pemerintah melalui DPMD Kabupaten setiap tahunnya, BUMNagMa akan melaporkan laporan tutup buku setiap akhir tahun, disamping itu BUMNagMa harus siap jika sewaktu-waktu DPMD Kabupaten meminta laporan. Tujuan dari hal ini merupakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan SOP dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi persoalan. Pertanggungjawaban jika terjadi persoalan dalam pemanfaatan program juga harus dilakukan oleh pemanfaat dalam pelaksanaan program ini, Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011) Tanggungjawab merupakan perubahan yang harus dilakukan melalui pengelolaan dengan penuh tanggung jawab agar perbaikan dapat tercapai dengan sebaik-sebaiknya.

Dapat dipahami dalam implementasi program SPP BUMNagMa akan bertanggungjawab kepada DPMD atas pemasalahan yang terjadi, disamping itu pemanfaat program melalui ketua kelompok juga harus mempertanggungjawabkan permasalahan yang terjadi.

f. Dukungan

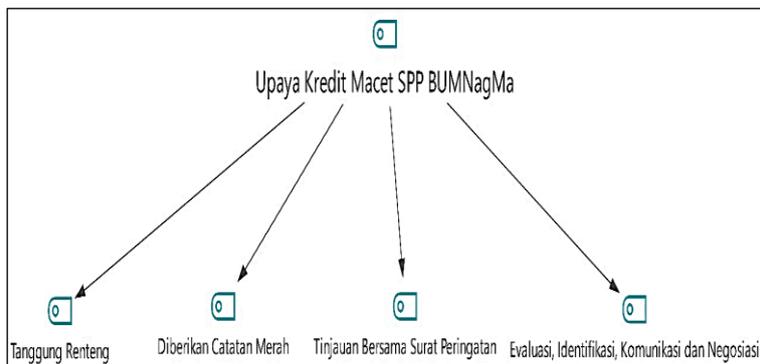
Dalam implementasi program, dukungan merupakan salah satu faktor yang akan membantu percepatan tercapainya tujuan dari program SPP, hal ini dibutuhkan tidak hanya oleh BUMNagMa sebagai pengelola saja, tetapi juga untuk perempuan pemanfaat program agar tujuan dari program dapat tercapai. Emitraan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Nagari BPD Sumbang ikut mendukung proses pengelolaan program yang dijalankan BUMNagMa, hal ini menjadi tolak ukur agar dan salah satu upaya untuk mempermudah percepatan tujuan program SPP oleh BUMNagMa untuk

meningkatkan taraf ekonomi keluarga melalui perempuan dengan kegiatan usaha produktif. Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011) menjelaskan dalam teorinya perlu bantuan dari berbagai pihak untuk mencapai perbaikan. Dukungan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis) secara bersamaan tanpa dominasi dari satu pihak atau faktor tertentu.

Dapat dipahami dalam pelaksanaan program SPP, BUMNagMa bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin asuransi bagi pemanfaat program SPP, disamping itu kemitraan dengan Bank Nagari BPD Sumbang dalam program ini juga menjadi salah satu faktor pendukung.

2. Upaya penyelesaian permasalahan kredit macet Program (SPP)

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet pada program simpan pinjam perempuan (SPP) Seperti yang dinyatakan oleh Poerwadarminta (2006: 1344), upaya mengacu pada tindakan mencoba untuk mengkomunikasikan maksud, alasan, dan usaha seseorang. Upaya mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kegunaan, efektivitas, tujuan yang dimaksudkan, fungsi, dan imbalan dari usaha tertentu. Upaya terkait erat dengan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ini. Untuk memastikan keberhasilannya, banyak metodologi, teknik, dan alat bantu yang digunakan. Secara lebih jelas digambarkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. MAXQDA Upaya Kredit Macet SPP BUMNagMa

a. Lakukan evaluasi, identifikasi, komunikasi dan negosiasi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola, BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak terdapat permasalahan kredit macet yang harus di upayakan agar tidak menghambat pencapaian tujuan dari program SPP. Perlu dilakukan evaluasi dalam proses implementasi program SPP sebelum kembali melanjutkan siklus program. Disamping itu identifikasi proposal dan peninjauan ke lapangan juga harus dilakukan untuk memastikan agar program ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

BUMNagMa merupakan instansi yang berbeda dengan instansi swasta dalam memberikan pinjaman, dari bentuk tujuan sudah terlihat beda yang signifikan, BUMNagMa menjalankan program simpan pinjam untuk modal usaha produktif khusus

bagi perempuan tanpa jaminan. Dalam permasalahan kredit macet, BUMNagMa melakukan komunikasi secara kekeluargaan kepada oknum yang terlibat permasalahan. Jika dibutuhkan, BUMNagMa akan memberikan kesempatan perpanjangan waktu untuk anggota terlibat mudah dalam membayar angsurannya.

Jika mengacu pada Poerwadarminta (2006:1344) komunikasi dan negosiasi merupakan salah satu usaha dalam menyampaikan maksud terhadap suatu hal agar lebih berdaya guna dalam mencapai suatu tujuan.

Dapat dipahami bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola, BUMNagMa harus melakukan upaya dalam hal evaluasi, identifikasi, komunikasi dan negosiasi. Berdasarkan investigasi penulis, dapat dipahami bahwa upaya ini belum mampu menjawab permasalahan kredit macet, upaya ini hanya akan membuat anggota yang bermasalah menjadi sulit paham akan tanggungjawabnya, mereka merasa kredit yang macet bukan suatu masalah karena komunikasi kekeluargaan yang dilakukan BUMNagMa.

b. Lakukan tinjauan bersama dengan peringatan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola, BUMNagMa juga melakukan upaya dengan meninjau bersama dengan surat peringatan untuk mengatasi permasalahan kredit macet. Tidak jarang dalam melakukan tinjauan, anggota yang bermasalah dalam kredit macet susah ditemui tanpa kabar. Dengan adanya surat peringatan diharapkan mampu menuntut pertanggung jawaban dengan secara baik sesuai prosedur.

Sejalan dengan pendapat Poerwadarminta (2006:1344) dapat dipahami bahwa peringatan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk usaha untuk memperbaiki permasalahan dengan upaya agar dapat mencapai tujuan dan fungsi sebenarnya dalam suatu program yang dilaksanakan.

Dapat dipahami bahwa BUMNagMa turun ke lapangan untuk meninjau langsung anggota yang bermasalah dengan membawa surat peringatan, hal ini dilakukan karena anggota yang bermasalah kreditnya tidak mengindahkan aturan pembayaran angsuran yang ditagih oleh ketua kelompok setiap bulan.

c. Kelompok yang bersangkutan akan mendapatkan catatan merah, jika permasalahan kredit macet sudah lewat dari 2 tahun.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola BUMNagMa berhak memberikan catatan merah jika anggota kelompok tidak menyelesaikan permasalahan kredit nya dalam kurun waktu 2 tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan dampak jera kepada anggota yang bermasalah, namun bagi anggota lain dalam kelompok tersebut bisa melakukan pinjaman kembali tapi dengan catatan untuk bergabung dengan kelompok lain atau membentuk kelompok sendiri.

Menurut Poerwadarminta (2006:1344) upaya mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kegunaan, efektivitas, dan keselarasan dengan tujuan, fungsi, dan imbalan yang diinginkan dari upaya tertentu. Catatan merah yang diberikan oleh BUMNagMa merupakan upaya yang bersifat memberikan efek jera guna berhasil dan sesuai dengan tujuan program yang dimaksud.

Dapat dipahami bahwa BUMNagMa memberikan catatan merah kepada kelompok, namun bagi anggota lain boleh mengajukan pinjaman di periode berikutnya dengan ikut bergabung kepada kelompok lain atau membentuk kelompok sendiri.

Berdasarkan hal yang penulis pahami bahwa upaya ini belum dapat mengatasi permasalahan kredit macet di BUMNagMa VII Koto, hal ini hanya akan meninggalkan jejak kotor atas peminjaman anggota yang terlibat dan membuat kelompok terpaksa di bubarkan dan harus bergabung dengan kelompok lain atau membentuk kelompok baru.

d. Menyelesaikan angsuran dengan tanggung renteng

Tanggung renteng merupakan upaya terakhir yang dilakukan BUMNagMa dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet, Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola BUMNagMa akan menutup angsuran macet dengan uang tanggung renteng kelompok, hal ini dilakukan atas persetujuan dari semua anggota kelompok dan telah disepakati bersama di atas materai sebelum dilakukan pencairan pinjaman di awal periode.

Tanggung renteng merupakan jenis hukum perikatan dan diatur dalam KUH Perdata pasal 178 yang menjelaskan bahwa suatu perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng yang terjadi oleh kreditur dan dalam bukti persetujuan tegas berupa surat pernyataan untuk pemenuhan seluruh hutang, tanggung renteng merupakan upaya terakhir yang dilakukan BUMNagMa untuk membayar hutang anggota bermasalah dengan sistem tanggung jawab bersama atas persetujuan seluruh anggota.

Dapat dipahami bahwa tanggung renteng dilakukan karena upaya lain tidak dapat menjawab permasalahan kredit macet dalam program SPP. Hal ini mungkin terpaksa diterima oleh anggota kelompok lain dan akan meninggalkan permasalahan personal antara anggota yang bermasalah dengan anggota yang lancar kreditnya.

SIMPULAN

Pelaksanaan peran yang dilakukan aktor dalam program simpan pinjam perempuan (SPP) sejauh ini belum mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan kredit macet dan penyalahgunaan dana program (SPP). Program ini bertujuan untuk pemberdayaan perempuan melalui kegiatan usaha produktif, Sarah Cook dan Steve Macaulay mengemukakan 6 indikator *ACTORS* yang dapat digunakan dalam penelitian ini. *Pertama authority* atau wewenang, aktor program SPP sejauh ini telah memberikan wewenang penuh dan tidak memberikan batas kepada perempuan untuk menjadi pemanfaat program SPP. *Kedua competence*, atau kemampuan, aktor program SPP menilai masyarakat belum seratus persen (baru 75%) mampu untuk mengelola dana program dan mengembangkan usaha dengan dana yang diberikan oleh BUMNagMa. *Ketiga Trust*, keyakinan. Aktor program SPP yakin jika program ini dilaksanakan dengan SOP yang ada, maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan masyarakat di Kecamatan VII Koto. *Keempat Opportunities*, Kesempatan. Penulis menilai bahwa aktor program SPP harus memberikan edukasi dan pembekalan lebih jauh, hal ini guna memberikan

pemahaman kepada pemanfaat program untuk dapat mengembangkan usaha yang mereka bangun. *Kelima, responsibilities*. Tanggung jawab dalam permasalahan yang terjadi merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program ini agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. *Keenam, support*. Dukungan dalam pelaksanaan program. Selama pelaksanaan program simpan pinjam perempuan (SPP), BUMNagMa selalu dihadapkan dengan persoalan dan tantangan sehingga belum sepenuhnya mencapai tujuan dari program SPP itu sendiri. Program SPP merupakan salah satu program percepatan pemerintah guna membantu peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dengan kegiatan usaha produktif. Persoalan dalam program ini terlihat dari adanya persoalan kredit macet yang menyentuh angka 295 juta lebih di tahun 2023 yang menandakan bahwa pengelolaan pinjaman oleh kelompok pemanfaat program masih perlu di evaluasi, disamping itu penggunaan dana untuk kebutuhan pribadi atau diluar tujuan program juga menjadi permasalahan yang perlu untuk di selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y., Topoglidis, E., Briscoe, P. B., Fantuzzi, A., Gilardi, G., & Durrant, J. R. (2004). Proton-coupled electron transfer of flavodoxin immobilized on nanostructured tin dioxide electrodes: Thermodynamics versus kinetics control of protein redox function. *Journal of the American Chemical Society*, 126(25), 8001-8009.
- Chandra, Y. E. N., Firdaus, R. Z., Syamsurizal, S., Ginting, R., Sakinah, R., Rakhmawati, D., ... & Putri, R. A. S. I. (2021). The Utilization of Digital Marketing and Entrepreneurial Skills in Enhancing Business Success for MSMEs in Bogor City. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1).
- Istifadah, D. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Terhadap Peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro Dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (Studi kasus pada Bumdesma Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung).
- Maani, K. D. (2011). Teori ACTORS dalam pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 10(1).
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja. Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.